

TAJUK RENCANA

Pramuka Sebagai Pembentuk Karakter & Nasionalisme

KONTROVERSI kembali muncul. Melalui Rakernas Pramuka di Wiladatika Cibubur, Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka mendesak Mendikbudristek merevisi Permen No 12/2024. Karena dalam Permen Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dicantumkan ekstrakurikuler Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Kwarnas Pramuka meminta revisi permen tersebut serta tetap menjadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, sebagaimana diatur sebelumnya. (KR, 27/4)

Polemik dan kontroversi bermula dari lahirnya Permendikbudristek No 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dalam pasal 34 Bab V Bagian Ketentuan Penutup Permendikbudristek No 12 Tahun 2024 tertulis : *Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.* Laman Kemdikbud menulis bila peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta 25 Maret 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2024. Artinya, aturan tersebut menganulir Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Permendikbud ini sontak mendapat reaksi kalangan pendidikan terlebih aktivis Pramuka. Tudingan akan terjadi langkah mundur dalam pendidikan karakter siswa pun dilontarkan. Mengingat, banyak pelajaran yang diperoleh dari kegiatan Pramuka yang bermanfaat dalam kehidupan keseharian, dan tidak ada dalam pelajaran di kelas. Keterampilan sosial, kemandirian, kerja tim, kepemimpinan merupakan aspek penting yang diperlukan dalam pendidikan dan kehidupan keseharian di masa depan. Menghilangkan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib akan

menghapus kesempatan siswa dan anak muda mengembangkan aspek tersebut secara holistic.

Tidak kita nafikan, di era teknologi canggih seperti sekarang, keluhan munculnya anak-anak muda asosial, individualis, egois terus mengemuka. Sejatinnya, kegiatan dalam Pramuka yang memupuk semangat kerja sama dan gotong royong sangat pas mengurai dan mengurangi perilaku buruk tersebut. Karena Pramuka mengajarkan kehidupan dalam tim. Disinilah karakter kemandirian, egois sama, toleransi, menghargai orang lain bahkan berbeda pendapat atau perbedaan lain akan diajarkan dan terpatuhi sejak dini. Sementara, kedisiplinan juga dibentuk lewat aktivitas baris berbaris, bermain kelompok dan lainnya juga terbentuk. Bisa dikatakan, Pramuka menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sekolah di negeri ini.

Selama ini sebagai ekstrakurikuler wajib, mungkin Pramuka hanya dilihat sekadar penggugur kewajiban sekolah. Mungkin karena keterbatasan pelatih, kegiatan dianggap kurang kreatif dan variatif. Muncullah keluhan kegiatan seolah menjadi beban anak di tengah padatnya pelajaran. Realita yang kemudian 'ditangkap' dan melahirkan Permendikbud No 12/2024. Padahal kegiatan Pramuka sekalipun hanya bernyanyi, dapat mengembangkan otak kiri dan orak kanan, di tengah padat dan penatnya belajar. Gerakan Pramuka juga sudah bertransformasi.

Kita melihat, Pramuka tetap memperkuat nilai luhur, membentuk identitas bangsa, serta nilai inovatif pada siswa. Pramuka juga menjadi icon membentuk karakter sekaligus memperkuat nasionalisme. Ketika pada saat sama juga membuka diri terhadap nilai-nilai universal di tengah percaturan global. Bukankah Pramuka juga menekankan pada kerja sama internasional, pertukaran budaya, peningkatan kesadaran isu global: perubahan iklim, ketimpangan sosial, kemiskinan, perdamaian dunia? Jika kegiatannya positif, mengapa hanya jadi ekstrakurikuler pilihan? Apalagi yang hendak dicari dalam pendidikan kita? ☐f

PASCAPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini, proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 boleh bilang tuntas. Selanjutnya, sege-nap jajaran penyelenggara pemilu dituntut bergegas mempersiapkan agenda demokrasi lokal, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. KPU menetapkan Rabu 27 November 2024 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih gubernur di 37 provinsi, bupati di 415 kabupaten, dan wali kota di 93 kota.

Pilkada dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinnya ialah salah satu momen krusial kehidupan demokrasi di Ibu Pertiwi. Apalagi jika mengingat pilkada dapat memberikan kebebasan pada rakyat dalam kerangka turut menentukan pemimpin yang akan memajukan daerah mereka. Oleh karenanya, menciptakan pilkada berintegritas jadi kewajiban semua pihak. Tak hanya penyelenggaranya, partai politik dan kandidat kepala daerah juga calon wakil kepala daerah, serta tentunya para pemilih. Terlebih mengingat dalam proses pilkada jamak tantangan yang dihadapi. Salah satunya politik transaksional nan bisa mengusik integritas demokrasi menjelang pilkada.

Berkaca dari pengalaman Pilpres 2024, gelombang bantuan sosial (bansos) membawa tudingan dan risiko *bahwabeleid* tersebut dimanfaatkan calon pemimpin guna keuntungan politik pribadi. Atas kausa tersebut, supervisi ketat distribusi bansos urgen diejawantahkan. Pertanyaannya, bagaimana agar preseden kurang tepat terkait pengelontoran bansos sebelum pemilu tak terulang lagi sehingga pesta demokrasi lokal bisa sarat integritas?

Pertama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai institusi yang mempunyai kewenangan mengontrol jalannya



cayakan keterlibatan masyarakat. Meski pengawasan pilkada ada pada “pundak” Bawaslu, namun pranata *a quo* harus mengimplikasikan khalayak dalam mekanisme kontrol. Di aras praksis, Bawaslu seyogianya menggandeng pelbagai lembaga dan komunitas masyarakat dalam pengawasan terkait bansos ataupun kegiatan politik calon pemimpin. Dengan pelibatan masyarakat seoptimal mungkin, bermacam deviasi dalam pilkada bisa cepat terdeteksi untuk kemudian lekas diambil tindakan asertif.

Berangkat dari hal-ihwal tersebut, sangat pantas pendistribusian bansos di tengah tahapan krusial pemilu memang seharusnya diatur. Perihal tersebut agar tak menimbulkan kecurigaan dalam pemanfaatannya terkait kepentingan elektoral. Toh beberapa waktu silam dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melontarkan wacana perihal penghentian penyaluran bansos sebelum pilkada. Konkritnya, kita bisa mencontoh Pemerintah Filipina yang melarang program menyalurkan dana bansos hingga termin enam bulan pra-pemilu. Bagaimanapun politisasi anggaran negara memang harus kolateral dengan regulasi serta digunakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata tanpa disalahgunakan. Akhirnya, jangan sampai bansos dipakai untuk kepentingan lainnya seperti untuk politik. Kita berharap pilkada serentak tahun 2024 ini jadi momentum lahirnya para pemimpin berkualitas dalam membangun daerah. ☐f

**) Yulianta Saputra SH MH, Dosen Prodi Ilmu Hukum, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi akan menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Retrospeksi antara Lebaran dan Urbanisasi

SELESAI sudah hingar-bingar arus mudik dan balik lebaran 2024. Saat pemudik balik ke tempat perantauannya, banyaknya anggota keluarga yang ikut bergabung. Fenomena ini menjadi hal rutin terjadinya, urbanisasi berbarengan dengan arus balik lebaran. Hal ini dikaitkan dengan fenomena sosial-ekonomi yang ada, di mana sebagian pemudik yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah membawa kerabat dekatnya untuk mengadu nasib di kota besar.

Urbanisasi sangat erat kaitannya dengan fenomena gerak penduduk di mana masyarakat cenderung memilih lingkungan dengan tingkat upah tinggi, fasilitas yang lengkap, dan infrastruktur memadai. Di sisi lain, urbanisasi yang tinggi juga dipengaruhi oleh *push factor* seperti tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan, terbatasnya modal kerja, hingga tingkat kemiskinan yang tinggi. Fenomena urbanisasi pada saat arus balik lebaran menunjuk pada fenomena gerak penduduk atau *population mobility*. Kota Yogya yang notabenenya adalah kota pelajar di mana ketika pendatang terutama mahasiswa telah menyelesaikan studinya akan mencari pekerjaan di kota besar yang mempunyai kesempatan kerja lebih tinggi.

Alasan utama terjadinya tingkat urbanisasi yang cukup besar dari DIY adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan UMP yang rendah bahkan cenderung tetap. Pemerintah Daerah Provinsi DIY (2023) menjelaskan nominal UMP DIY pada akhir tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,27% atau menjadi Rp 2.125.897,61 dibanding tahun sebelumnya. Namun, perlu diketahui bahwa nominal UMP yang ada ternyata belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat mengingat per-

Unggul Priyadi dan Alivia Rianti Putri

ubahan harga-harga barang yang bersifat dinamis. Kondisi ini menjadi alasan kuat bagi sebagian masyarakat di DIY untuk mengadu nasib ke kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan sekitarnya.

Pada akhirnya, arus balik pasca lebaran menjadi salah satu momentum dalam terciptanya fenomena urbanisasi dan hanya membutuhkan hitungan hari saja pendatang di kota besar seperti DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Derasnya urbanisasi tanpa diimbangi modal manusia yang mumpuni, para pendatang mudah “terjebak” ke dalam sektor informal di kota-kota besar. Dengan demikian perlunya evaluasi serta analisis mendalam untuk menghasilkan kebijakan program urbanisasi yang efektif.

Berdasarkan data Dukcapil Pemprov DKI tercatat tren jumlah pendatang pasca-lebaran, dan arus balik mudik selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sebanyak 24.043, tahun 2021 sebanyak 20.046, tahun 2022 sebanyak 27.478 dan tahun 2023 sebanyak 25.918. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dalam menekan kepadatan penduduk melalui Disdukcapil DKI Jakarta adalah dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan di mana warga yang memiliki KTP DKI Jakarta diwajibkan sesuai dengan domisilinya. Di samping itu berbagai imbauan dari pejabat Pemprov DKI agar masyarakat yang mudik pada saat balik

Jakarta tidak membawa sanak saudara beradu nasib di Jakarta, terlebih belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan.

Daerah-daerah yang berpotensi menjadi penyumbang adanya urbanisasi ke kota-kota besar sudah selayaknya ikut secara langsung dan tidak langsung meningkatkan ketrampilan warganya untuk berusaha di daerahnya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan warganya dan mendorong ada pembangunan daerahnya. Terlebih dengan adanya UU Desa yang dapat menjadi akselerasi penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. ☐f

**) Dr Unggul Priyadi MSi, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, FBE UII Yogyakarta.*

**) Alivia Rianti Putri, Alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan, FBE UII Yogyakarta.*

Pojok KR

Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan.

-- Sang Penyair, selamat pulang ke keabadian .

Muhammadiyah tanam 1.000 pohon mangrove.

-- Semoga mengilhami yang lain menjaga lingkungan.

Disusun perencanaan perkotaan Kartasura.

-- Dulu adalah pusat Kerajaan Mataram Islam.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jalan Rusak Menuju Nepal van Jawa

KAMIS pekan lalu, bersama keluarga saya meniatkan diri mengunjungi Nepal van Java di Kabupaten Magelang. Keinginan yang sudah cukup lama karena banyaknya komentar mengenai keindahan yang acap disampaikan teman maupun keluarga. Selain terus terang karena tergoda tayangan-tayangan di media yang sangat luar biasa. Kebetulan juga ada keperluan di Yogya sehingga berencana sekalian mengisi sisa liburan. Tidak diingkar, kami menemukan perjalanan dengan pemandangan indah membuat mata segar dan semua bahagia. Sebagai orang yang hidup di Jakarta, alam yang segar dan udara yang sejuk tentu sangat memesonakan kami semua. Rasa tenang kami rasakan ketika melihat gapura memasuki Desa Nepal. Kendaraan pun melalui terus menanjak. Miris. Jalan menuju kawasan

wisata yang terkenal ini banyak berlubang. Dan kami akhirnya tidak melanjutkan perjalanan bahkan putar balik ketika hujan turun. Kami pikir, suasana hujan juga akan percuma, apalagi kabus cukup tebal. Kala turun, kami melihat di gapura terdapat pengumuman yang menyebutkan : *jalan ke arah Nepal van Jawa nanjak, sempit, rusak & berbahaya. Sementara Dialihkan lewat Pasar Gatukan & Desa Sukamakmur.* Kemudian arah pulang tertulis 5 KM.

Mungkin kami memang salah karena ketika masuk tidak membaca pengumuman itu. Namun pertanyaannya, sejak kapan pengumuman tersebut dan lantas kapan jalan tersebut akan diperbaiki Pemkab Magelang? Jangan sampai jalan alternatif nanti juga ikut rusak, sementara jalan utama belum diperbaiki.

**) Candra MM, Kelapa Gading Jakarta Timur*

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishag Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.